

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pada instansi pemerintah berupa lembaga pendidikan yaitu SMA Negeri 2 Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau, membandingkan dan mengevaluasi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah di SMA Negeri 2 Kebumen berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 Sttd UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan beberapa metode terkait. Dalam penelitian ini dibahas mengenai mekanisme, kepatuhan, dan hambatan bendahara pemerintah dalam memotong dan memungut pajak penghasilan. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, 22, dan 23. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemotongan dan pemungutan, bendahra SMA Negeri 2 Kebumen sudah memiliki kepatuhan yang cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan dasar pengenaan pajak (DPP), tairf pada PPh pasal 21, dan kesalahan penggolongan objek pajak dan tarif pada PPh pasal 22 dan 23. Selain itu dalam melakukan penyetoran bendahara SMA Negeri 2 Kebumen juga sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa transaksi yang terlambat disetor pajaknya oleh bendahara. Hambatan yang dialami oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen diantaranya, eror pada server e-billing, pengetahuan dan informasi yang terbatas terkait pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

Kata Kunci: Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, Bendahara Pemerintah, Instansi Pemerintah, Penyetoran Pajak Penghasilan, Hambatan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Abstract

This study discusses about withholding of income taxes carried out by the government treasurer at a government agency in the form of an educational institution, namely SMA Negeri 2 Kebumen. The purpose of this study is to review, compare and evaluate the withholding of income taxes made by the government treasurer at SMA Negeri 2 Kebumen based on Law of Republic of Indonesia Concerning Income Tax Number 7 of 1983 as lastly amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The method used in this research is a qualitative method with several related methods. This study discusses the mechanism, compliance, and obstacles of the government treasurer in withholding of income taxes. The scope of this research is limited to withholding of income tax articles 21, 22, and 23. This study concludes that in carrying out the income tax withholding, the treasurer of SMA Negeri 2 Kebumen already has fairly good compliance, but there are still some errors in the use of the basis for imposition taxes (DPP), tariffs on income tax article 21, and errors in classifying tax objects and tariffs on income tax articles 22 and 23. In addition, in depositing the treasurer of SMA Negeri 2 Kebumen it is also quite good although there are still some transactions that are late in being deposited by the treasurer. Obstacles experienced by the treasurer of SMA Negeri 2 Kebumen include an error on the e-billing server, limited knowledge and information regarding withholding of income taxes.

Keywords: Withholding of Income Tax, Government Treasurer, Government agencies, Income Tax Payment, Barriers to Withholding of Income Tax.